EFEKTIVITAS, DAYA PAJAK DAN KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2013-2017 DI UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR BONDOWOSO

Meysa Sita Irfani , Diyah Probowulan, SE., MM, Didik Eko Pramono, SE., Msi., Ak 1510421047

Universitas Muahammadiyah Jember, Jawa Timur, Indonesia

Email: meysasita69@gmail.com

ABSTRAK

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak provinsi yang memberikan sumbangan paling banyak diantara pajak provinsi yang lain. Setiap tahunnya Pajak Kendaraan Bermotor selalu mengalami peningkatan. Pajak Kendaraan Bermotor diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan bagi program pembangunan daerah dan mensejahterakan masyarakat. Penelitian ini dijabarkan dengan metode deskriptif persentase dan lokasi penelitian bertempat di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso periode 2013-2017, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Potensi Pajak Kendaraan Bermotor, Daya Pajak, Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian menunjukan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor belum sesuai dengan potensi rill, Daya Pajak yang masih rendah, Efektivitas pajak kendaraan bermotor sangat efektif dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah yang sangat baik.

Kata Kunci: Efektivitas, Daya Pajak, Kontribusi

ABSTRACT

Motor Vehicle Tax is a provincial tax that provides the most contribution among other provincial taxes. Every year Motor Vehicle Tax always increases. Motor Vehicle Tax is expected to be a source of funding for regional development programs and the welfare of society. This research is described by descriptive method of percentage and location of the study located at Bondowoso East Java Provincial Revenue Management Unit 2013-2017, the purpose of this study is to know the Potential of Motor Vehicle Taxes, Tax Effort, motor vehicle tax

effectiveness, and motor vehicle tax contributions to locally-generated revenue. The results showed that the Potential of Motor Vehicle Tax was not in accordance with real potential, the Tax Effort was still low, the effectiveness of motor vehicle tax was very effective and the motor vehicle tax contribution was very good.

Keywords: Effectiveness, Tax Effort, Contributions



PENDAHULUAN

Dalam menghadapi arus globalisasi, pemerintah memiliki peran penting pelaksanaan pembangunan dalam terutama di Negara berkembang salah satunya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam serba global peran zaman yang pemerintah untuk melakukan merupakan pembangunan kunci menuju masyarakat yang lebih baik bidang ekonomi. dalam Untuk melaksanakan pembangunan nasional diperlukan dana cukup besar yang digunakan sebagai modal dalam membiayai setiap pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan. Ketercapaian pembangunan nasional dapat terjadi jika semua pihak mendukung dan memberikan kontribusi penuh terhadap setiap program yang buat oleh pemerintah guna mensukseskan Pembangunan Nasional. Salah adalah keberhasilan satunya pembangunan di setiap daerah. Dalam melaksanakan pembangunan daerah diperlukan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam

bidang keuangan daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola secara efektif dan efisien. Kemampuan keuangan disuatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya realisasi pendapatan asli daerah yang diperoleh dari setiap daerah yang ada di Indonesia.

UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso merupakan Unit Pelaksanaan Teknis yang letaknya di Kabupaten Bondowoso. Penerimaan pajak provinsi yang cukup menonjol di UPT Pengelolaan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bondowoso adalah dari Pajak Kendaraan Bermotor. Berikut ini adalah realisasi Penerimaan Kas untuk Pajak Kendaraan Bermotor Di **UPT** Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso

Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso.

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	Kenaikan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
	Rp	%
2013	30.385.871.355	-
2014	33.475.900.297	33
2015	37.590.071.980	37
2016	40.934.717.876	40
2017	45.871.603.546	45

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso

Berdasarkan data dari tabel 1.2 diatas, terlihat bahwa setiap tahunnya total Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor kas yang ada di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso kenaikan mengalami setiap tahunnya. Jika dibandingka kenaikan Jumlah Kendaraan Bermotor dengan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan keduanya Bermotor mengalami peningkatan hanya saja terdapat perbedaan angka yang signifikan.

Adapun rumusan masalah yang penulis rumuskan dari hasil penelitian sebagai berikut :

- Bagaimana Efektivitas Pajak Kendaraan di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso.
- Bagaimana Daya Pajak (Tax Effort) dari Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso
- 3. Bagaimana Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Darah di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso. Adapun tujuan penelitian yang penulis cantumkan dari penelitian
- 1. Untuk Mengetahui Efektivitas
 Pajak Kendaraan di UPT
 Pengelolaan Pendapatan Daerah
 Provinsi Jawa Timur
 Bondowoso.

sebagai berikut:

- Untuk Mengetahui Daya Pajak
 (Tax Effort) dari Pajak
 Kendaraan Bermotor di UPT
 Pengelolaan Pendapatan Daerah
 Provinsi Jawa Timur
 Bondowoso.
- Untuk mengetahui Kontribusi
 Pajak Kendaraan Bermotor

terhadap Pendapatan Asli Daerah di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso.

TINJAUAN PUSTAKA

Berikut adalah pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Halim (2007), Pendapatan merupakan Asli Daerah semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok Asli Daerah (PAD) Pendapatan dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu; Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lainlain PAD yang sah.

Warsito (2001) menjelaskan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Dalam Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah,

hasil retribusi daerah. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan memberikan keleluasaan untuk kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudan asas desentralisasi.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang - Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan). Di Indonesia, Pajak merupakan sumber penerimaan negara sangat besar yang kontribusinya dalam membiayai kebutuhan belanja negara pembangunan nasional. Dimana hal tersebut tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sabijono Menurut Tungka dan (2005) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan berfungsi lainnya yang untuk mengubah suatu sumber daya energi tenaga tertentu menjadi gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

Daya Pajak (*Tax Effort*) adalah rasio antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan masyarakat dalam membayar pajak di suatu daerah.

Adapun Kriteria Tax Effort sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kriteria dari *Tax Effort*

Persentase	Kriteria	
76% - 100%	Tinggi	
51% - 75%	Sedang	
26% - 50%	Rendah	
0% - 25%	Sangat Rendah	

Martoyo (1998)mendefinisikan efektivitas sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan digunakan, sarana yang serta kemampuan yang dimiliki adalah tujuan tepat, sehingga yang diinginkan dapat dicapai dengan memuaskan. hasil yang Tingkat efektifitas dapat digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu:

- Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100 persen berarti sangat efektif.
- 2. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100 persen berarti efektif.
- Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100 persen berarti tidak efektif.

Menurut T Guritno (1997) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersamasama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Berikut ini adalah indikator dalam menilai kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 2.2 Indikator menilai kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

METODE PENELITIAN

Metode penelitian akan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian Deskriptif Persentase yaitu untuk mengetahui persentase dengan menjelaskan variabel melalui pengukuran obyektif dan analisis numerikal (Maradalis, 2003).

Ada dua teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis vaitu:

- 1. Teknik wawancara
- 2. Teknik dokumentasi

Teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu:

1. Potensi Pajak Kendaraan

Bermotor

(Tarif PKB x Harga Kendaraan Bermotor x Jumlah Obyek)

Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor

$$Efektivitas = \frac{Realisasi \ Penerimaan \ Pajak}{Potensi \ Penerimaan \ Pajak} \times 100\%$$

3. Daya Pajak (Tax Effort)

$$Daya Pajak = \frac{Penerimaan Pajak}{Kemampuan Bayar Pajak} = \frac{(Penerimaan Pajak)t}{PDRB} \times 100\%$$

4. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor

Kontribusi PKB =
$$\frac{\text{Realisasi PKB}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor yang dikelola oleh UPT Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso

Hasil Penelitian

Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dari semua perhitungan efktivitas Pajak Kendaraan Bermotor yang diperoleh tahun 2013 sampai 2017 diketahui bahwa efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso selama lima tahun dikatakan sangat efektif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut.

Tabel 4.9
Perhitungan Efektivitas Pajak
Kendaraan Bermotor di UPT
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Provisi Jawa Timur Bondowoso
Tahun 2013-2017

Tahun	Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (Persen)	Kriteria
2013	113	Sangat Efektif
2014	164	Sangat Efektif
2015	107	Sangat Efektif
2016	111	Sangat Efektif
2017	119	Sangat Efektif

Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Darah Provinsi Jawa Timur Bondowoso, data diolah

Faktor yang menyebabkan Sangat Efektif diantaranya:

- a. Jumlah kendaraan bermotor yang setiap tahunnya juga mengalami kenaikan
- Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor selama ini pada umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan

c. Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam hal ini UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso dinilai sangat efektif dalam mengelola penerimaan pajak atas kendaraan bermotor. Salah satu alasannya adalah karena pemerintah Provinsi memberikan keringanan pajak yaitu penghapusan denda pajak, sehingga wajib pajak di Provinsi Jawa Timur Khususnya Kabupaten Bondowoso patuh dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Daya Pajak (*Tax Effort*) Pajak Kendaraan Bermotor

Tabel 4.10
Perhitungan Daya Pajak (*Tax Effort*)
Pajak Kendaraan Bermotor di UPT
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Provisi Jawa Timur Bondowoso
Tahun 2013-2017

Tahun	Daya Pajak (Tax Effort) Persen	Kriteria
2013	25	Sangat Rendah
2014	25	Sangat Rendah
2015	25	Sangat Rendah
2016	26	Rendah
2017	26	Rendah

Sumber: Biro pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, Data diolah

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, terlihat pada Tabel 4.10 bahwa selama lima tahun, daya pajak mengalami peningkatan dan penurunan atau fluktuasi. Daya Pajak atau kemampuan membayar pajak mengalami penurunan pada tahun 2014 dan kemudian mengalami kenaikan lagi tahun 2015 sampai 2017. Daya Pajak atau tahun kemampuan membayar pajak di Bondowoso tergolong Kabupaten rendah, hal ini ditunjukan dengan daya pajak terendah persentase sebesar 25 persen dan tertinggi 26 Berdasarkan hasil persen. perhitungan pajak, daya mengindikasi bahwa kemampuan masyarakat dalam membayar pajak masih harus ditingkatkan. Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat membayar pajak maka pemerintah daerah dapat dilakukan

kestabilan dengan membangun ekonomi sehingga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah bisa ditingkatkan yang pada akhirnya meningkatkan dapat kemampuan bayar masyarakat disuatu daerah terutama di Kabupaten Bondowoso. Faktor – faktor yang menyebabkan kemampuan membayar pajak rendah berdasarkan wawancara dengan Bendahara DI UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso yaitu Bapak Didik Koeswantoro adalah:

- 1. Kemiskinan
- 2. Sanksi Yang Kurang Tegas
- Kesadaran masyarakat atau wajib pajak yang masih kurang tentang pentingnya membayar pajak

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tabel 4.11
Perhitungan Kontribusi Pajak
Kendaraan Bermotor terhadap
Pendapatan Aasli Daerah di UPT
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Provisi Jawa Timur Bondowoso
Tahun 2013-2017

Tahun	Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (Persen)	Kriteria
2013	53	Sangat Baik
2014	58	Sangat Baik
2015	63	Sangat Baik
2016	63	Sangat Baik
2017	64	Sangat Baik

Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli di UPT Pengelolaan Daerah Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso tergolong sangat baik. Tahun 2013 sebesar 53 %, Tahun 2014 sebesar 58 %, Tahun 2015 sebesar 63 %, Tahun 2016 sebesar 63 %, Tahun 2017 sebesar 64 %, hal tersebut menunjukan tren yang setiap tahunnya mengalami peningkatan kontribusi. Penyebab kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah adalah teralisasinya pemenuhan target yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi yaitu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Hal Ini juga menunjukkan Pemerintah bahwa Kabupaten

Bondowoso dalam **UPT** hal Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso cukup baik dalam mengidentifikasi, menggali potensi, dan mengoptimalkan objek pajak kendaraan bermotor untuk dipungut sebagai pajak kendaraan bermotor.

PENUTUP

KESIMPULAN

Penelitian ini dimaksud untuk menganalisis menganalisis Efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor, Daya Pajak (Tax Effort) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso, dari analisis data diambil telah beberapa yang kesimpulan sebagai berikut:

 Target Perimaan Pajak Kendaran Bermotor yang ditetapkan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso belum sesuai dengan potensi rill dari Pajak Kendaraan Bermotor.

- 2. Hasil perhitungan Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso sudah sangat efektif.
- 3. Hasil pengukuran Daya Pajak Effort) menunjukan (Tax masyarakat kemampuan membayar pajak di Kabupaten Bondowo rendah dan masih perlu ditingkatkan lagi kedepannya. Peningkatan kemampuan membayar pajak bertujuan untuk ini meningkatkan penerimaan pajak dimasa yang akan datang dalam hal ini khususnya Pajak Kendaraan Bermotor.
- 4. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso selama periode Tahun 2013-2017 sangat baik.

SARAN

- 1. Memaksimalkan wajib pajak pribadi khususnya pemilik pajak kendaraan bermotor dengan cara memberikan penyuluhan atau sosialisasi dan apresiasi kepada dalam masyarakat yang patuh membayar pajak.
- UPT Pengelolaan Pendapatan
 Daerah Provinsi Jawa Timur
 Bondowoso melakukan penggalian

- potensi Pajak Kendaraan Bermotor seperti pendataan ulang objek pajak dan wajib pajak secara maksimal.
- 3. UPT Pengelolaan Pendapatan Jawa Daerah Provinsi Timur Bondowoso bekerja sama dengan berbagai pihak salah satunya menjaring Kepolisian kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak dengan razia secara rutin
- 4. Melakukan peningkatan dalam memberikan pelayanan pembayaran pajak, dengan menambahkan SDM dan sarana prasarana dalam mempermudah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), perpanjangan STNK, denda bulanan di dan denda tahunan, **UPT** Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso.
- 5. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur melakukan inovasi-inovasi dalam mempermudah wajib pajak membayar Pajak Kendaraan Bermotor seperti Mall Pelayanan Publik.

DAFTAR PUSTAKA

BARAT, P. A. D. P. S. ANALISIS

EFEKTIVITAS DAN

KONTRIBUSI PAJAK

KENDARAAN BERMOTOR

TERHADAP.

- Eryandi, G., Alfansi, L., & Benardin, B. **ANALISIS** (2011).**EFEKTIVITAS** PEMUNGUTAN **PAJAK** KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN **KENDAPATAN ASLI** DAERAH (PAD) DI BENGKULU. **PROVINSI** DAN **EKONOMI PERENCANAAN** PEMBANGUNAN, 4(2), 37-44.
- Karina, N., & Budiarso, N. (2016). **Analisis Efektivitas** dan Kontribusi Pajak Kendaraan Terhadap Bermotor Pendapatan Asli Daerah Gorontalo. Jurnal Provinsi EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Bisnis Manajemen, dan Akuntansi, 4(1).
- Kobandaha, R., & Wokas, H. R.

 (2016). Analisis Efektivitas,

 Kontribusi dan Potensi Pajak

 Reklame dan Pajak Hotel

 Terhadap Pendapatan Asli

 Daerah Kota Kotamobagu.

- Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4(1).
- Malombeke, N. (2016). Analisis

 Potensi dan Efektivitas

 Pemungutan Pajak Parkir di

 Kabupaten Minahasa Utara.

 Jurnal EMBA: Jurnal Riset

 Ekonomi, Manajemen, Bisnis

 dan Akuntansi, 4(1).
- Novella, E., & Baihaqi, B.

 ANALISIS TAX EFFORT,

 EFEKTIVITAS,

 KONTRIBUSI DAN
 - PERTUMBUHAN PAJAK DAERAHKOTA BENGKULU TAHUN 2011-2014. Jurnal Akuntansi, 4(1), 33-50.
- Pemerintah Indonesia. 2004.

 Undang-Undang No. 33 Tahun
 2004 Tentang Pertimbangan
 Keuangan Antara Pemerintah
 Pusat Dan Pemerintah Daerah.
 Lembar Negara RI Tahun
 2004, No. 33. Sekertariat
 Negara. Jakarta
- Pemerintah Indonesia. 2004.

 Undang-Undang No. 32 Tahun
 2004 Tentang Pemerintah
 Daerah. Lembar Negara RI

- Tahun 2009, No. 32. Sekertariat Negara. Jakarta
- Pemerintah Indonesia. 2009.

 Undang-Undang No. 28 Tahun
 2009 Tentang Pajak Daerah
 dan Retribusi Daerah. Lembar
 Negara RI Tahun 2009, No.
 28. Sekertariat Negara. Jakarta
- Pemerintah Provinsi Daerah No. 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Surabaya
- Pemerintah Provinsi Daerah No 67
 Tahun 2016 tentang
 Kedudukan, Susunan
 Organisasi, Uraian Tugas dan
 Fungsi serta Tata kerja Badan
 Pendapatan Daerah Provinsi
 Jawa Timur
- Pramesthi, PD, & Adnan, M. (2015).

 Evaluasi Efektivitas

 Penerimaan Pajak Kendaraan

 Bermotor sebagai Sumber

 Pendapatan Asli Daerah Tahun

 2010-2014 Provinsi Jawa

 Tengah. Jurnal Studi Politik

 dan Pemerintahan , 4 (3), 301
 310.
- Riady, I., SBM, N., & Nugroho, S. B. M. (2010). *Analisis Potensi* Penerimaan dan Efektivitas

- Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).
- Rompis, N. E., Ilat, V., & Wangkar, A. (2015). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Provinsi Daerah Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Airmadidi). Jurnal Samsat Berkala Ilmiah Efisiensi, 15(4).
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* Alfabeta, Bandung.
- Syahputra, A. (2018). Analisis

 Penerimaan Pajak Kendaraan

 Bermotor Dan Bea Balik Nama

 Kendaraan Bermotor Pada Upt.

 Samsat Medan Selatan.
- Winerungan, O. L. (2013).Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. Jurnal EMBA: Riset Jurnal Ekonomi, Manajemen, **Bisnis** dan Akuntansi, 1(3).

Wokas, H. (2014). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di provinsi maluku utara. *ACCOUNTABILITY*, 3(1), 56-65.

